



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA
MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

ZULHAZMI SHOBRI

NIM : 11327103963

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYAR'IAH & ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau



ate Islamic University of Su

ebutkan sumber:

penyusunan laporan, penulisan kritik dan saran, serta masalah.

Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

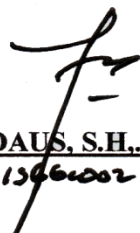
Skripsi dengan judul: ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LOIBERIKA MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDNNAG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS*** yang ditulis oleh:

Nama : **ZULHAZMI SHOBRI**
 Nim : 11327103963
 Program Studi : Ilmu Hukum/Bisnis

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Dhul Qadah, 1441 H
 24 Maret 2020 M

Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, S.H., M.H.
 NIP: 13660021534031002



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, yang ditulis oleh :

Nama : ZULHAZMI SHOBRI
NIM : 11327200721
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Basir, S.H., M.H

Penguji I
H. MHD. Kastulani, S.H., M.H

Penguji II
FIRDAUS S.H., M.H

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Zulhazmi Shobri (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikasi Geografis satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting diperhatikan, terkait nama daerah dan tempat asal produk. Kekayaan produk Indikasi Geografis menjadi potensi bagi masyarakat dan negara bila dikelola dengan benar. Di akhir tahun 2019 Indikasi Geografis terdaftar baru berjumlah 87 Indikasi Geografis. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah potensi sumber daya alam geografis Indonesia.

Salah satu Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Yaitu, kopi liberika meranti yang didaftarkan kelompok Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti dengan Seri – A No. 01/IG/I/A/2016, diumumkan tanggal 29 Januari 2016 – 29 April 2016, dengan No. Agenda IG.00.2014.000014. Untuk bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap Indikasi Geografis, kopi liberika meranti harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Masalah dalam penelitian ini pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis kopi liberika meranti di Kab. Kepulauan Meranti menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis kopi liberika meranti di Kab. Kepulauan Meranti.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun yang menjadi lokasi penelitian pada Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti Kec. Rangsang Pesisir Kab. Kepulauan Meranti-Riau.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan mengambil populasi ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti 1 orang, selanjutnya Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kab. Kepulauan Meranti 1 orang dan Kepala Bidang Layanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Riau 1 orang. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Selanjutnya hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa tidak adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis kopi liberika meranti sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 70 Undang-undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. dikarenakan adanya instrument hukum yang tidak lengkap, rumitnya syarat pendaftaran Indikasi Geografis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pemerintah belum menjadi koordinator terhadap instansi-instansi yang berkaitan terhadap kemanjuran Indikasi Geografis



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada sang pengenggam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya yakni Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat berbingkiskan salam saya sampaikan kepada seorang direktur yang tak berdasi yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat-Nya dari alam kegelapan kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program strata satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis tulis adalah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.**

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

Yang sangat berharga dan paling penulis cintai dalam hidup yaitu ibu Rosniar ayan Drs. Musa, yang telah menjaga dan membesarkan dengan penuh kesabaran, memberi semangat, nasihat, doa, kasih sayang dan materil.

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelyanan dan bimbingan. Dan sekaligus pembimbing proposal dan skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Jummi Nelly, S.Ag, M.Ag. Selaku Penasehat Akademis yang mengarahkan dan mengingatkan Penulis agar melalui proses perkuliahan dengan baik dan segera menyelesaikan skripsi secepatnya.

Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Subjek Dan Objek Penelitian	11
3. Populasi dan Sampel	12
4. Sumber Data	14
5. Metode Pengumpulan Data	14
6. Metode Analisis Data	15
7. Metode Penulisan	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	18
1. Sejarah	18
2. Geografi dan Iklim	20
3. Pemerintahan	21
4. Penduduk	22
5. Pendidikan	23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Gambaran Umum Kopi Liberika Meranti	24
1. Sejarah	24
2. Kopi Liberika Meranti	25
C. Masyarakat Peduli Kopi Liberika Meranti	28
1. Sejarah	28
2. Maksud dan Tujuan	28
3. Struktur Organisasi	29
4. Peraturan Masyarakat Peduli Kopi Liberika Meranti	30

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Hak Kekayaan Intelektual	31
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	31
2. Latar Belakang Berlakunya Hak Kekayaan Intelektual	32
3. Teori Hak Kekayaan Intelektual	34
4. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual	36
B. Indikasi Geografis	39
1. Pengertian Indikasi Geografis	39
2. Unsur-unsur Dalam Indikasi Geografis	40
3. Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia	42
4. Perkembangan Dan Pengaturan Indikasi Geografis Dibeberapa Negara	44
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ..	52
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti	63



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai beberapa tujuan yang termaktub dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berkaitan dengan kesejahteraan umum, maka salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian tersebut adalah keberhasilan dibidang pembangunan ekonomi.¹

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, maka Pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan, termasuk pembangunan dibidang hukumnya. Salah satu asas yang terpenting dalam batang tubuh UUD 1945, yang menjadi landasan pembangunan ekonomi Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan “bumi dan air dan

¹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan hukum persaingan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual.

Perdebatan dari aspek akademisi mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih terus berlangsung hingga saat ini. Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan baik pada umumnya adalah negara maju. Hak Kekayaan Intelektual diyakini mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.³

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi

² Mochtar Kasumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 3.

³ Abdul Thalib Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaku ekonomi terutama akan melukai si pemilik sah dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁵ Hak Kekayaan Intelektual itu bermula dari sebuah karya, ilmu pengetahuan, cipta, rasa dan karsa manusia, oleh karena itu perlunya ada suatu penghormatan dan pemeliharaan terhadap hasil karya tersebut.

Masalah penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hal yang selalu dipertanyakan banyak pihak, terutama para investor asing. Berbagai pelatihan baik didalam maupun diluar negeri tidak henti-hentinya diselenggarakan untuk mendidik setiap komponen penegakan hukum di Indonesia dapat lebih memahami persoalan Hak Kekayaan Intelektual ini, namun tetap saja semua itu masih dirasakan tidak cukup dan kembali aparat

⁴ Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: 1993), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penegak hukum dipertanyakan profesionalitasnya untuk menegakkan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 Tentang Merek menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan, yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Sejalan dengan telah diratifikasinya berbagai konvensi internasional dan seiring pula dengan tuntutan era perdagangan global diperlukan perangkat hukum baru yang lebih reponsif, maka diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.⁶

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan Indikasi Geografis adalah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting diperhatikan, terkait nama daerah dan tempat asal produk. Kekayaan produk Indikasi Geografis bisa menjadi potensi bagi masyarakat dan negara bila dikelola dengan benar.⁷ Secara normative definisi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut

⁶ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Rema Cipta, 2009), h. 6

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol/20727/perindungan-produk-indikasi-geografis-indonesia-masih-tertinggal/> Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2019 Pukul 10.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.⁸

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, sebagai negara yang besar Indonesia mempunyai berbagai hasil alam dengan keunikan-keunikannya tersendiri. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan budaya masyarakatnya yang mampu menciptakan kreatifitas-kreatifitas yang bersifat khas. Potensi-potensi tersebut dapat memberikan keuntungan apabila negara Indonesia dapat melindungi produk-produk khasnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Namun tanpa disadari banyak aset dan kekayaan intelektual lokal telah terdaftar diluar negeri sebagai milik orang asing.

Dari data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa hingga akhir tahun 2019 Indikasi Geografis yang terdaftar baru sejumlah 87 Indikasi Geografis.⁹ Jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah ribuan potensi sumber daya alam geografis Indonesia. Setiap kabupaten di provinsi Riau memiliki produk khas unggulan masing-masing. Dikatakan produk khas karena barang barang yang dimaksud mempunyai karakteristik khusus yang hanya ada didaerah bersangkutan dan tidak dapat diperoleh didaerah lain yang berkulitas,

⁸ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

⁹ <https://dgip.go.id/berita-resmi-indikasi-geografis> Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2019 Pukul 09.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reputasi dan ciri-ciri lainya dari barang tersebut secara esensial berkeitan dengan asal geografisnya.

Provinsi Riau memiliki banyak Indikasi Geografis, hanya 1 (satu) Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Yaitu, Kopi Liberika Meranti yang didaftarkan kelompok Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) dengan Nomor Agenda IG.00.2014.000014. Kopi Liberika Meranti berasal dari Kec. Rangsang Pesisir Kab Kepulauan Meranti. Selain itu masih ada beberapa banyak yang menjadi potensi Indikasi Geografis di kabupaten Kepulauan Meranti seperti berbagai olahan produk dari pohon sagu, berbagai olahan biji kopi rangsang meranti, tanjak, songket dan kerajinan tangan dari kayu meranti. Hal ini tentu menjadi anugrah bagi masyarakat setempat untuk pertumbuhan ekonomi serta digunakan sebagai aset perdagangan untuk kesejahteraan penduduk kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti haruslah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 53 Ayat (1) "*Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri*".

Pasal 66 "*Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup: huruf (a). pernakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikasi Geografis; huruf (d). pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar”.

Pasal 70 Ayat (1) “Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pernerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya”.

Sebagai Indikakasi Geografis yang terdaftar di provinsi Riau, Kopi Liberika Meranti banyak sekali mengalami permasalahan yang terjadi, permasalahan utama tidak adanya perlindungan hukum terhadap pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan pemakai Indikasi Geografis terdaftar, memberikan perlindungan dalam konteks pembinaan sosialisasi dan juga pengawasan kepada petani yang tidak memenuhi dokumen deskripsi Indikasi Geografis.¹⁰

Tidak hanya itu bahwa adanya pasar gelap yang menjual-belian Kopi Liberika Meranti ke negara Malaysia dan Kopi Liberika Meranti yang dijual masih dalam keadaan berbiji tentunya akan memudahkan untuk mengklaim oleh pihak asing. Fenomena seperti ini akan berdampak terhadap rusaknya pangsa pasar dari Kopi Liberika Meranti yang terkenal dengan ciri khasnya.¹¹

Tidak adanya perlindungan hukum pelanggaran atas Indikasi Gegrafis Kopi Liberika Meranti tentu akan mudah terjadi sengketa yang dapat merugikan pemegang Indikasi Gegrafis terdaftar dan berdampak kepada

¹⁰ Al Hakim, (Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti) Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2020.

¹¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persoalan pelaksanaan perdagangan internasional, pemasaram dalam negeri, persaingan usaha, dan juga politik yang muncul terhadap kurangnya perlindungan hukum dari Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.**

B. Batasan Masalah

Agar Penulis lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dalam melakukan penelitian ini, penulis perlu memberi batasan masalah, adapun batasan masalah yang akan diteliti adalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap indikasi geografis kopi liberika meranti dan faktor penghambat dalam perlindungan hukum indikasi geografis kopi liberika meranti.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti di kabupaten Kepulauan Meranti menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti di kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menambah wawasan tentang keilmuan dan cakrawala berpikir dalam kajian ilmiah dan mengembangkan keilmuan penulis dibidang hukum perdata bisnis yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual terutama bidang indikasi geografis.
- c. Sebagai bahan dan informasi bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi Mahasiswa/i bagian hukum bisnis untuk sebagai referensi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan Penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan.¹² Jenis penelitian ini tergolong kepada *penelitian hukum Sosiologis* yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali yang dimaksud dari deskriptif ialah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹³

Dalam hal ini tentunya penulis memberikan gambaran tentang perlindungan hukum kopi liberika meranti dan faktor penghambat dalam

¹² Moh. Nazir, *Metode penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998) h. 13.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Palu : Sinar Grafika, 2009) h. 105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum kopi liberika meranti. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka penelitian yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini dilakukann di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut diduga terdapat permasalahan Indikasi Geografis terhadap Kopi Liberika Meranti yang merupakan produk lokal masyarakat Kecamatan Rangsang Pesisir.

b. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas, obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi perlindungan hukum terhadap Indikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Geografis Kopi Liberika Meranti menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hukum tersebut.

3. Populasi dan Sempel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁴ Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawa ini:

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) h. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sempel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti	1 Orang	1 Orang	100%
2	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas PPK&UKM Kab. Kepulauan Meranti	1 Orang	1 Orang	100%
3	Kepala Bidang Layanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Riau	1 Orang	1 Orang	100%
Jumlah		3 Orang	3 Orang	100%

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti yaitu Al Hakim, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kepulauan Meranti, Marwan SE dan Kepala Bidang Layanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Drs. Warudhju Gani Purwoko MH. Jumlah keselurannya dalam penelitian ini adalah 3 sub populasi 3 orang sampel dengan persentase 100%.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, Data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek yang akan diteliti baik yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan alat lainya merupakan data primer.¹⁵
- b. Data Sekunder, Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data-data dari instansi atau lembaga penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan pengamatan yang langsung terhadap objek yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang mendukung permasalahan.¹⁷
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan subjek dan objek penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

¹⁵ *Ibid*, h. 88.

¹⁶ *Ibid*, h. 8.

¹⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan bentuk tulisan dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan perumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal bersifat khusus.

7. Metode penulisan

Setelah data-data terkumpul penulis mengolah dan menganalisisnya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Metode deskriptif yaitu metode penulisan yang bersifat menguraikan atau memaparkan sebuah kata dengan jelas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang gambaran umum Kabupaten Kepulauan Meranti, masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti dan Kopi Liberika Meranti.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan tentang tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, indikasi geografis, dan teori perlindungan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan faktor



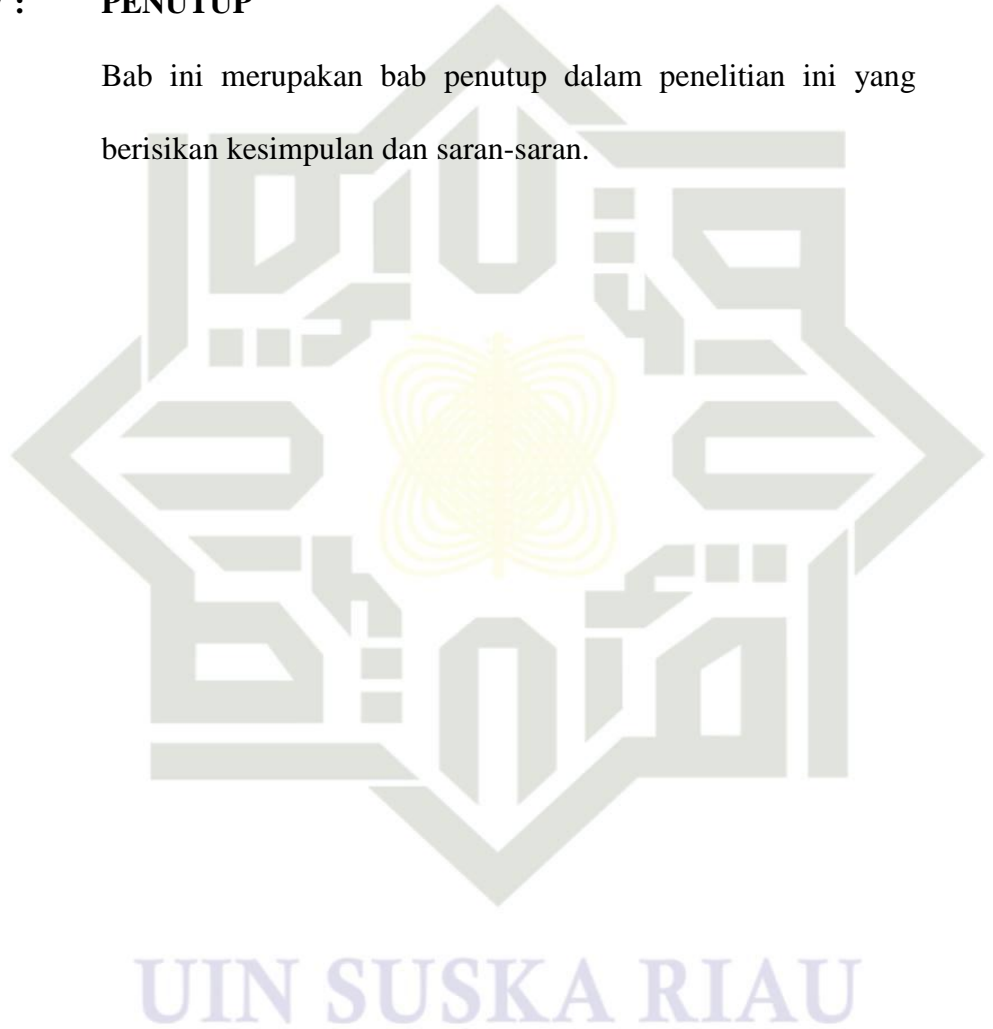
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat dalam perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Kabupten Kepulauan Meranti

1. Sejarah

Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti, dahulu merupakan salah satu bandar/kota yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan.

Daerah Selatpanjang dan sekitarnya sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu kesultanan terbesar di Riau saat itu. Pada masa pemerintahan Sultan Siak VII yaitu Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (bertahta tahun 1784 - 1810), biasa disapa Sultan Syarif Ali, memberi titah kepada Panglima Besar Muda Tengku Busu Sayid Ahmad untuk mendirikan Negeri atau Bandar di Pulau Tebing Tinggi.¹⁸

Pembentukan kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya

¹⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2020 Jam 13:00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.¹⁹

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008

¹⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.²⁰

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

2. Geografi Dan Iklim

Meranti merupakan kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya berupa kepulauan. Secara astronomis berada pada 0o 42'-1o 28' Lintang Utara dan 102o 12'103o 10' Bujur Timur. Kepulauan Meranti berbatas-an dengan Kab. Bengkalis dan Selat Melaka di sebelah utara, Kab. Siak dan Kab. Pelalawan di sebelah selatan, Kab. Siak dan Kab. Bengkalis di sebelah barat dan Selat Melaka disebelah timur. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2009, Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kab Bengkalis dengan total wilayah seluas 3.707,84 KM2.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Statistik Daerah Kepulaun Meranti 2019*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, Katalog: 1101002.1410 Tahun 2019), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Meranti beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 25-32⁰ C. Curah hujan pada tahun 2018 berkisar antara 3-57 MM per tahun. Secara administratif, saat ini kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sembilan kecamatan. Yaitu: Tebing Tinggi Timur, Tebing Tinggi Barat, Putri Puyu, Merbau, Rangsang, Pulau Merbau, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat dan Tebing Tinggi. kecamatan terluas adalah kecamatan Tebing Tinggi Timur (20,71 persen), beribukota di Sungai Tohor. Kecamatan yang terjauh dari Ibukota kabupaten, yaitu Kota Selatpanjang adalah kecamatan Tasik Putri Puyu (97 KM dari Selatpanjang).

3. Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termuda di Provinsi Riau. Mekar dari kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Bengkalis, pada 19 Desember 2008. Meranti terbagi atas sembilan kecamatan. Pada tingkatan yang lebih rendah, terdapat 5 kelurahan dan 96 desa dengan satuan lingkungan setempat sebanyak 475 Rukun Warga (RW) dan 1.133 Rukun Tetangga (RT). Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2018 adalah 3.053 orang.²² Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 2,30 persen dibanding tahun 2017.

Berdasarkan tingkat pendidikan, PNS dengan lulusan Sarjana merupakan lulusan terbanyak dengan jumlah 1.654 orang (54,18 persen), disusul dengan

²² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lulusan Diploma (I-III) sebanyak 732 orang (23,98 persen) dan SLTA sebanyak 628 orang (20,57 persen).

Realisasi penerimaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 sebesar Rp. 1074,71 milyar. Berasal dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 68,01 milyar (6,33 persen); 2) Dana perimbangan sebesar 781,60 milyar (72,72 persen); dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 215,43 milyar (20,01 persen).

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD terbesar berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 56,31 persen dari total PAD. Diikuti oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar 22,76 persen. Sedangkan sumber terbesar dalam Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 51,62 persen; Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 20,67 persen; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 20,31 persen.

Besarnya Belanja Daerah pada tahun 2018 adalah 1042,03 milyar; Belanja Langsung sebesar 50,65 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 49,34 persen. Anggota DPRD Kepulauan Meranti pada tahun 2018 sebanyak 30 orang, 25 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

4. Penduduk

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2018 adalah sebesar 0,59 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2017. Data BPS mencatat jumlah penduduk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2018 adalah 184.372 jiwa. Dengan wilayah seluas 3.707,84 KM², maka setiap KM² wilayah rata-rata ditempati oleh 49 orang penduduk.²³

Sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio penduduk di kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2018 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 105. Artinya pada tahun 2018, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

5. Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai usia resmi jenjang pendidikannya. APM jenjang pendidikan SD masih tetap berada pada poin 100 pada tahun 2018. Sedangkan jenjang SMP dan SMA, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Ini mengindikasikan terjadi penurunan penduduk usia SMP dan SMA yang bersekolah.²⁴

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan harapan lamanya seorang anak akan bersekolah (dalam tahun). HLS Kepulauan Meranti pada tahun 2018 adalah 12,78 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,78 tahun atau setara dengan Diploma I. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kepulauan Meranti adalah 7,48 tahun. Artinya, secara

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rata-rata penduduk Meranti usia 25 tahun keatas, hanya menempuh pendidikan selama 7,48 tahun atau hampir menamatkan kelas 2 SLTP.

B. Gambaran Umum Kopi Liberika Meranti

1. Sejarah

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, pada awalnya mengenal kopi Liberika dengan sebutan nama kopi Sempian. Perkembangan kopi dimulai di desa Kedabu Rapat, kecamatan Rangsang Pesisir, diawali dengan upaya dari salah seorang warga bernama Haji Saleh yang merantau ke Batu Pahat, Johor Baru, Malaysia. Dengan ketertarikannya terhadap kopi yang ada di Batu Pahat Malaysia pada tahun sekitar 1942, H Saleh yang bernama asli Dul Samad membawa 6 benih kopi ke Sempian untuk ditanam di kebunnya. Setelah berkembang dan menghasilkan buah, H Saleh berupaya membibitkannya.²⁵

Itulah awal berkembangnya kopi di Desa Kedabu Rapat dilakukan dengan cara memanfaatkan benih kopi yang tumbuh di sekitar pohon induknya. Dengan pertumbuhannya yang bagus, masyarakat mulai mengembangkan sebagai tanaman perkebunan. Dari Parit Amat, perkebunan kopi meluas ke Parit Gantung, Parit Kasan, yang kemudian dikenal sebagai Sempian. Selanjutnya

²⁵ Al Hakim, (Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti) Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkembang di daerah sekitarnya seperti Parit Besar, Parit Senang, dan Parit Kasan. Daerah ini merupakan penghasil kopi terbesar di Kepulauan Meranti.²⁶

2. Kopi Liberika Meranti

Berbeda dengan kopi pada umumnya yang tumbuh di dataran tinggi, Kopi Liberika Meranti justru dibudidayakan di dataran rendah yang hanya memiliki ketinggian sekitar satu meter dari permukaan laut. Kopi tersebut ditanam di atas lahan gambut yang secara alami memang tidak subur dikarenakan tingkat keasamannya yang tinggi atau kebiasaannya yang rendah. Proses penanamannya pun tidak kalah unik. Sebelum menanam, tanah gambut dipadatkan terlebih dahulu selama 3-4 tahun guna menjaga kualitas kopi. Untuk menetralkan keasaman, tanah juga diberikan kapur pertanian atau dolomit terlebih dahulu.²⁷

Setelah tanah memadat, gambut tersebut kembali dibersihkan dengan membuat pancang lobang dengan kedalaman 40 x 40 cm dan didiamkan selama setengah bulan. Kemudian membuat parit-parit kecil sebagai jalannya air yang dihasilkan oleh gambut tersebut. Sementara untuk pemupukan diberikan 3-4 kali selama setahun dengan pupuk organik. Anakan kopi liberika diambil dari pembibitan biji kopi dari pokok batangan induk. Di Indonesia sendiri, hanya

²⁶ Al Amin, (Sekretaris Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti) Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2020.

²⁷ <https://biz.kompas.com/read/2019/04/15/084223728/inovasi-desi-kedaburapaten-budidayaan-kopi-liberika-di-lahan-gambut?page=all>. Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 16.30 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada dua daerah yang berhasil melakukan inovasi budidaya kopi di lahan gambut, yaitu Kuala Tungkal, Jambi dan Kedaburapat. Meskipun demikian, Kopi Liberika Meranti memiliki kelebihan serta keunikannya sendiri.²⁸

Menurut keterangan dari pengurus Masyarakat Peduli Kopi Liberika Meranti, perkebunan kopi yang ada di Desa Kedabu Rapat saat ini luasnya mencapai 775 hektar. Sedangkan yang tergabung dalam kelembagaannya, terdiri dari beberapa desa di kecamatan Rangsang Pesisir dengan luas mencapai 1100 hektar. Kebun kopi Liberika di desa lebih banyak tumbuh di lahan gambut dan sebagian lagi tumbuh di tanah mineral. Karena hasil dari kopi ini sangat menjanjikan, dan sangat diminati oleh negara Malaysia. Banyak masyarakat setempat menjadikan kopi liberika sebagai komoditas andalannya.

Menurut Al Hakim tanaman kopi Liberika Meranti dipanen setiap 20 hari sekali. Dalam sekali panen, bisa mencapai 100 kg, dengan kisaran harga jual kopi besarannya Rp3.000/kg. Setiap petani bisa mendapat Rp 300.000/ 20 hari, dalam bentuk bubuk berharga Rp 100.000 hingga Rp 200.000/Kg dan Rp.1.200.000/Kg Kopi luak liar liberika meranti.

Adapun kelebihan dari kopi yang sebelumnya dikenal dengan nama Kopi Sempian ini adalah sudah memiliki hak sertifikat Indikasi Geografis (IG). Seperti diketahui, sertifikat IG merupakan sertifikat resmi yang diberikan pada sumber daya alam hayati, hasil pertanian, pengolahan, atau hasil kerajinan

²⁸ Al Hakim, (Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti) Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2020.'



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan yang memiliki kekhasan dibandingkan produk dari wilayah lain. Hal itu dijelaskan langsung oleh petani kopi yang juga ketua kopi Liberika Meranti, yaitu Al Hakim.

Kopi liberika meranti juga aman untuk lambung karena memiliki tingkat kafein rendah, yaitu hanya 0,9-1 persen. Kualitasnya tidak perlu diragukan karena para petani kopi yang tergabung dalam Kelompok Tani Liberika Rangsang Meranti menggunakan pupuk organik dan telah melalui uji mutu yang sesuai dengan standar Jepang.

Bicara keunikan, Al Hakim menerangkan bahwa Kopi Liberika Meranti memiliki perpaduan rasa yang unik, yaitu kopi, nangka, dan cokelat. Padahal, kopi-kopi tersebut tidak dibudidayakan bersama dengan tanaman kakao, melainkan tumbuh dalam satu lahan dengan tanaman kelapa. Selain rasa yang unik, Kopi Liberika Meranti ini juga berukuran lebih besar bila dibandingkan biji kopi jenis arabika maupun robusta. Kulit buah kopinya sangat tebal, sehingga membuat ukuran buah kopinya besar. Ini menjadi faktor keunggulan, karena buah kopi menjadi lebih kuat dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Peduli Kopi Liberika Meranti

1. Sejarah Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti

Sebagai suatu organisasi kelompok yang bergerak dibidang pertanian kopi liberika dibentuk atas kesadaran, keinginan dan I'tikad baik dari para petani, di lalan Parit Aman Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Selaku kelompok tani selalu berusaha meningkatkan mutu dan hasil pertanian dengan teknologi-teknologi yang diberikan dan dibina oleh pemerintah. Secara aktif berpartisipasi turut membantu usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang pertanian. Kelompok Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti berdiri pada tanggal 02 Oktober 2014 dengan No Registrasi/Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 154.2/HK/KPTS/X2014.²⁹

2. Maksud dan Tujuan Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti

Berusaha meningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian dibidang kopi liberika meranti, Membina rasa persaudaraan dikalangan para petani serta mengabdikan bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi anggota kelompok tani kopi liberika.

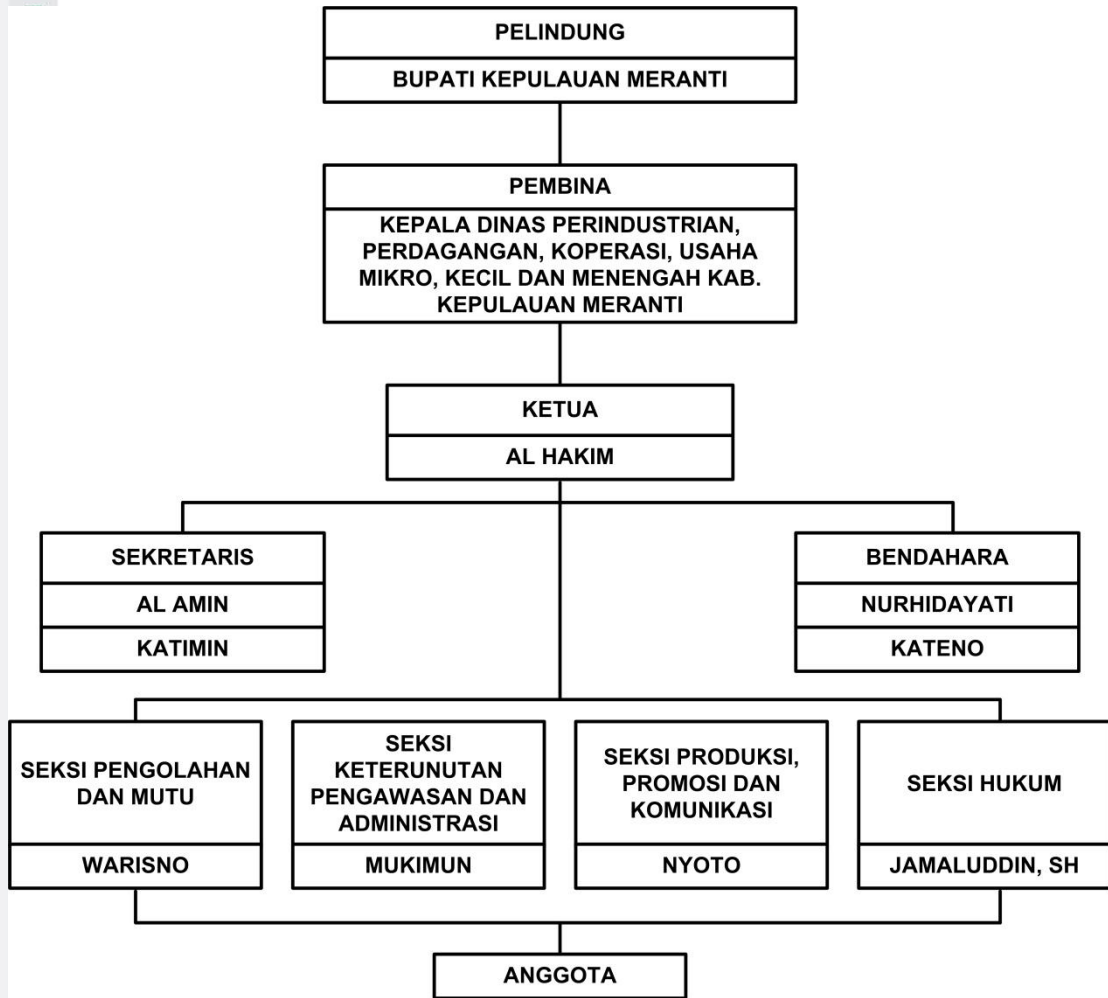
²⁹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rngsang Meranti

Sanksi organisasi kelompok tani kopi liberika meranti diperlukan untuk menegakkan disiplin organisasi dan menjamin kepastian pelaksanaan organisasi kelompok tani. Adapun sanksi yang diberlakukan dalam kelompok Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran nama baik kelompok tani, pengurus anggota dan atau kelompok tani lain akan diberhentikan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali.
2. Tidak merawat atau memelihara tanaman dengan baik dan benar akan dikenakan sanksi tidak mendapat pelayananan dari kelompok selama 1 (satu) tahun setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali .
3. Menjual hasil tani tidak melalui kelompok tani kopi liberika akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali.
4. Mencuri hasil tani anggota lainnya akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan.
5. Mencuri alat pertanian orang lain atau sesama anggota akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUN TEORI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta penemuan invensi dibidang teknologi. Karya-karya dibidang Hak Kekayaan Intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan dan hasil intuisi hati nurani.³⁰

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan reward yang sesuai bagi para inventor atau pencipta Hak Kekayaan Intelektual. Melalui reward tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tanpa izin dan selanjutnya menjadi komoditi ekonomi yang

³⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Yogyakarta: Yustisia, 2010), h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah Negara yang menjadi produsen Hak Kekayaan Intelektual³¹

2. Latar Belakang Berlakunya Hak Kekayaan Intelektual

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya intelektual pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai hakikatnya pula Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud.

Untuk mewujudkan hubungan perdagangan internasional, Negara yang memenangkan perang telah berusaha untuk membentuk *Internasional Trade Organizations* (ITO). Akan tetapi pembentukan ITO mengalami kegagalan karena Amerika Serikat tidak mendukungnya. Sebagai gantinya dibentuk *The General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT), perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947. GATT adalah bagian dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan antar Negara-negara anggota PBB dalam hubungan perdagangan internasional.³²

³¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2.

³² H.S. Karatdjoemena, *Subtansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sistem Kelembagaan, prosedur implementasi dan kepentingan Negara Berkembang*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000), h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangannya, Negara anggota GATT mengadakan perundingan putaran Uruguay dengan menerima kesepakatan naskah *Final Act Uruguay Round* pada tanggal 15 Desember 1993, sebagai hasil kongkret perundingan putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986 dengan Deklarasi *Punta DelEste. Final Act Uruguay Round* secara resmi ditandatangani di Marakesh, Maroko oleh 125 negara termasuk didalamnya Indonesia. Perundingan tersebut didalamnya untuk membentuk *World Trade Organizations* (WTO) yang merupakan lembaga penerus GATT, perjanjian perdagangan barang, perjanjian perdagangan jasa-jasa, serta perjanjian Hak Kekayaan Intelektual.³³

Dari sanalah, pada pertengahan tahun 1980-an, Negara-negara yang tergabung dalam dalam GATT/WTO bersepakatan tentang aturan main Hak Atas Kekayaan Intelektual lebih-lebih dalam tahun 2002, Indonesia dan Negara berkembang lainnya yang menjadi anggota AFTA, dituntut untuk mempersiapkan perangkat-perangkat aturannya, antara lain tentang masalah peraturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan implementasinya.³⁴

Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994. Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga Undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang

³³ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 40.

³⁴ Ibid, h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual yang baru bagi Indonesia.³⁵

Dengan adanya substansi perjanjian TRIPs dalam GATT maka Indonesia harus konsekuen terhadap hasil perjanjian perdagangan internasional GATT dengan melakukan berbagai kebijakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. selain itu penerapan perlindungan terhadap pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual harus benar-benar memberikan jaminan atas tindakan pembajakan, pencurian, pembocoran, pengungkapan dan tindakan curang lainnya.

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.³⁶

³⁵ Achmad Zen Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 7.

³⁶ Rose Diana Daniswara, Hak Kekayaan Intelektual, http://abcdanis.id/2013/05/hakkekayaan-intelektual_15.html diakses pada 16 November 2018. Pukul 17:40 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:³⁷

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu :

1. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

2. *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi

³⁷ Tomi Suryo Utomo. Op.cit. h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakat.

c. *Contact Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

4. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-Prinsip Umum yang berlaku di dalam HKI adalah sebagai berikut:³⁸

a. Hak Kekayaan Intelektual Memberikan Hak Eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi,

³⁸ Tomi Suryo Utomo. *Op.cit.* h.12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptaan, dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual.

b. **Hak Kekayaan Intelektual Melindungi Usaha Intelektual Yang Bersifat Kreatif Berdasarkan Pendaftaran**

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual diseluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Dua sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. *First to file system*

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama, artinya jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk diproses

2. *First to use system*

Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. **Prinsip Pendaftaran Bersifat Tetorial**

Pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat tetorial. Artinya, perlindungan hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara didalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku dinegara lainya.

d. **Prinsip Pemisahan Benda Secara Fisik Dengan Hak Kekayaan Intelektual, Yang Terkandung diDalam Benda Tersebut**

Sistem ini sangat unik dan merupakan ciri khas Hak Kekayaan Intelektual, karena didalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud, penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Didalam sitem Hak Kekayaan Intelektual, seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu.

e. **Prinsip Jangka Waktu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Adalah Terbatas**

Meskipun ada cabang Hak Kekayaan Intelektual (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. INDIKASI GEOGRAFIS

1. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa IG merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah suatu identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu. Dan

melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

f. **Prinsip Kekayaan Intelektual Yang Berakhir Perlindungannya Menjadi Publik Domain**

Hak Kekayaan Intelektual yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (publik domain). Semua orang berhak untuk mengakses Hak Kekayaan Intelektual yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tempat atau daerah itu menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk. Produk Indikasi Geografis tidak mesti bersal dari faktor alam, faktor campuran manusia bisa menentukan kekhasan suatu produk.³⁹

Berbeda dengan hak merek yang dapat dimiliki dengan secara perorangan, kepemilikan Indikasi Geografis tidak dimiliki secara individualistik. Indikasi Geografis lebih bersifat komunalistik, dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Namun, untuk proses pendaftarannya, diwakili oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu.

2. Unsur-Unsur dalam Indikasi Geografis

Rumusan definisi Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dan syarat utama. Berikut ini adalah unsur-unsur tersebut.⁴⁰

a. Unsur Indikasi Geografis Untuk Mengidentifikasi

Indikasi Geografis tidak dibatasi pada penggunaan nama geografis atau nama tempat di mana barang itu berasal, tetapi boleh menggunakan tanda lain yang sudah menjadi simbol ikon dari suatu negara. Hal ini disebabkan, karena tidak dipersyaratkan untuk menggunakan nama geografis secara langsung. Indikasi Geografis hanya untuk barang-barang

³⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 152.

⁴⁰ Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, (Universitas Lampung: 2012), h. 151.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak termasuk jasa sesuai dengan definisinya yang hanya menyebut barang.

b. Unsur Wilayah dalam Negara

Dalam mengidentifikasi barang itu senantiasa terkait atau dikaitkan dengan tempat atau wilayah oleh karena itu dalam rumusan definisi dikatakan bahwa mengidentifikasi barang yang berasal dari dalam wilayah negara anggota, atau daerah, atau tempat di dalam wilayah itu. Akibatnya, tertutup kemungkinan untuk memberikan hak melekatkan Indikasi Geografis pada pihak di luar wilayah.

c. Unsur Kualitas, Reputasi, atau karakteristik lain

Kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain dari barang yang pada hakikatnya diakibatkan oleh asal geografisnya. Rumusan definisi Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIPs, menggunakan kata-kata “kualitas reputasi, atau karakteristik lain”. Penggunaan kata “atau” tersebut, menunjukkan sifat alternative, dengan demikian tidak diisyaratkan harus seluruh unsur terpenuhi, tetapi cukup hanya satu unsur saja sudah dapat diberikan perlindungan.

Kriteria dari unsur kualitas kadang kala bersifat subyektif, Unsur reputasi lebih bersifat subyektif dan kualitatif, karena sulit untuk membuat ukuran yang obyektif.

Unsur karakteristik yang lain pada barang dapat ditafsirkan luas, ada yang menafsirkan bahwa karakteristik lain dari lingkungan geografis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi faktor alam, seperti tanah dan iklim, dan faktor manusia seperti tradisi professional tertentu dari produsen yang dibentuk dalam wilayah geografis yang ditentukan.

3. Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia

Bahwa perlindungan terhadap Indikasi Geografis secara umum telah diatur dalam *TRIPs Agreement*. Sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan Konvensi Paris yang berisi penagasan larangan unruk memperdagangkan barang yang menggunakan Indikasi Geografis sebagai objek atas Hak Kekayaan Intektual yang tidak sesuai dengan asal daerah atau wilayah Indikasi Geografis tersebut. Indonesia sebagai negara yang ikut WIPO juga menyetujui terbentuknya *Trips Agreement*, sebagai konsekuensinya Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan Hak Kekayaan Intelektualnya dengan persetujuan *TRIPs*. Salah satunya masalah perlindungan Indikasi Geografis.⁴¹

Disamping sebagai konsekuanesi atas keterikatan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional diatas, juga karena faktor kesadaran akan banyaknya potensi alam dengan nilai ekonomis dan reputasi tinggi yang dimiliki Indonesia, yang memerlukan perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik dalam skala nasional maupun internasional.

⁴¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, pengaturan mengenai indikasi geografis sudah diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, yang terdiri dari Bab VIII Indikasi Geografis, Bab IX Pendaftaran Indikasi Geografis, Bab X Pelanggaran dan Gugatan, Bab, XI Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. Saat ini Indonesia masih belum memiliki Undang-undang Indikasi Geografis tersendiri karena masih dijadikan satu dengan Undang-undang merek. Indikasi Geografis juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Konsep indikasi geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, dari dinas Pemerintah, warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai indikasi geografis. Jumlah indikasi geografis di Indonesia masih banyak, hanya saja banyak yang masih belum mendapatkan sertifikasi indikasi geografis. Indikasi geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana Hak Kekayaan Intelektual kita menganut prinsip yang pertama mengajukan dan yang pertama menciptakan.⁴²

⁴² Budi Agus Riswandi, *Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis*, (Yogyakarta: FH UII, 2006), h 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perkembangan Indikasi Geografis dan Pengaturannya di Beberapa Negara

a. Konvensi Paris

Pengertian yang berkaitan dengan Indikasi Geografis dapat ditemukan dalam Konvensi Paris yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1883 dan telah mengalami beberapa kali revisi hingga perubahan terakhir pada tahun 1979.⁴³

Indikasi geografis tidak ditentukan secara spesifik pada konvensi ini, Pasal 9 Konvensi ini, secara umum menentukan kewajiban kewajiban yang berkaitan dengan cara penagangana barang barang impor yang mengandung merek dagang yang melawan hukum, termasuk barang-barang yang menggunakan tanda-tanda asal tempat yang tidak tepat. Menurut ketentuan konvensi ini barang barang tersebut harus dijadikan objek penyitaaan. Dalam kaitan ini, Pasal 10 Konvensi Paris menetapkan hak untuk menuntut atau melakukan tindakan hukum sesuai dengan hukum domestik dinegara terkait.⁴⁴

b. Perjanjian Madrid 1891

Perjanjian Madrid 1891 tentang Represi terhadap indikasi Asal barang yang menggunakan istilah Indikasi Geografis, tetapi Indikasi Asal atau *Indication of Source* dari produk barang, perjanjian Madrid 1981 ini juga tidak menyatakan definisi Indikasi Asal secara ekspisif. Meskipun demikian, dengan

⁴³ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 161.

⁴⁴ *Ibid*, h.162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya keharusan untuk menyita setiap barang yang memakai Indikasi Asal yang salah atau menyesatkan, bisa ditafsirkan bahwa setiap Indikasi Asal harus secara jelas merepresentasikan tempat asal dari barang Terkait.⁴⁵

c. Perjanjian Lisabon 1958

Perjanjian Lisabon 1958 tentang perlindungan Apelsi Asal dan Registrasi Internasionalnya mirip dengan Indikasi Geografis, yakni Apelasi Asal atau *Appellations of Origin*. Apelasi Asal ini dapat diterjemahkan sebagai nama formal asal. Dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini, Apelasi Asal atau *Appellations of Origin* didefinisikan sebagai :

“nama geografis dari suatu Negara, daerah, atau lokalitas yang menandakan bahwa suatu produk berasal darinya dan memberikan kualitas dan karakter yang secara eksklusif dan esensial disebabkan oleh lingkungan geografisnya, termasuk faktor-faktor alam dan faktor manusia”.

Defenisi ini memberikan perlindungan khusus, tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam jenis, pembuatan, dan imitasi yang merupakan turunan produk dari daerah lain. Berdasarkan tafsir yuridis yang lazim dipakai dalam Apelasi Asal perjanjian Lisabon 1958 memberikan ke-17 negara anggotanya perlindungan produk Apelasi Asal secara Negara-negara anggota penandatanganan perjanjian

⁴⁵ *Ibid*, h.162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini, setiap barang yang diproteksi menurut perjanjian ini tidak akan menjadi generik meskipun ia telah menjadi amat terkenal sehingga konsumen mulai mnggeneralisasi barang-barang yang mirp sebagai barang tersebut.

d. Perutaran Perundang-Undangan Uni Eropa

Di kalangan Negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa, untuk melindungi produk-produk pertanian dan makanan yang berasal dari daerah tertentu *The Council Regulation* (EEC) Nomor 2081/92 Of July 1992 memakai istilah Indikasi Geografis atau *Geographical Indications* dan Tanda atas Asal yang Berbeda atau *the Designations of Origin*.

Di samping itu objek perlindungan dari peraturan-peraturan ini adalah minuman anggur, minuman beralkohol lainnya (*spirit*), dan produk-produk pertanian lainnya. Dalam peraturan-peraturan ini, tidak ada pembedaan atas Asal yang berbeda atau *Designatin of Origin* adalah nama dari sebuah daerah, tempat khusus, atau Negara yang menunjuk kepada produk yang berasal dari daerah, tempat khusus, atau ngara tersebut, yang kualitas dan karakter-karakter lainnya secara esensial atau eksklusif disebabkan oleh lingkungan geografis tertentu.

e. Hukum Amerika Serikat

Berapa ahli Indikasi Geografis dari Eropa sering berpendapat bahwa di Amerika Serikat, perlindungan Indikasi Geografis tidak berkembang. Meskipun demikian, di Amerika Serikat terdapat beberapa peraturan berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis yang diregistasikan. Jenis Indikasi Geografis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak diregistrasi ini lazim dikenal sebagai Merek Bersertifikat berdasarkan Sistem Hukum *Anglo Saxon* atau *a Common Law Certification Mark Based An Common Law System*.

f. Perjanjian TRIPs 1994

Perjanjian internasional ini merupakan hasil dari putaran perjanjian umum international mengenai perdagangan dan tarif di Uruguay pada tahun 1994. Sebagai salah satu rezim dari TRIPs, Indikasi Geografis diatur berdasarkan tujuan utama TRIPs untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi Hak atas Kekayaan Intelektual, dan untuk meyakinkan tiap anggota TRIPs bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual tidak akan menjadi salah satu aspek nontarif yang menghalangi perdagangan barang dan jasa secara internasional.

Sesuai pasal 22 (1) TRIPs, Indikasi Geografis adalah Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari suatu teritori di dalam Negara anggota atau daerah/lokalitas dalam teritori tersebut ditentukan secara esensial oleh tempat asalnya. Artinya, dalam konteks Indikasi Geografis, harus ada aspek-aspek khusus yang dapat berwujud unsur-unsur alam, lingkungan lain, atau benda-benda tertentu yang bersifat unik, yang menunjukkan keterkaitan yang khas antara nama tempat dengan barang.

Dari pasal 22 (2a) TRIPs, ditafsirkan bahwa tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi konsumen dari kesesatan atau kebingungan. Tujuan ini serupa dengan tujuan utama Merek.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hanya saja, berbeda dengan Merek, Indikasi Geografis selalu berkaitan dengan daerah asal barang.

TINJAUN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁶

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai cirri memerintah dan melarang serta

⁴⁶ Satjipro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti: hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, dan hukum dalam arti disiplin hukum. Dari berbagai arti hukum yang telah dikemukakan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁴⁷

Sedangkan perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.⁴⁸ Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.

⁴⁸ Satjipro Rahardjo, *op.cit*, h.55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁹
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁰
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵¹
- d. Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

⁴⁹ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121

⁵⁰ Jurnal Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14. Diakses tanggal 1 Maret 2020

⁵¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga hukum.⁵²

- e. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁵³

⁵² Satjipro Rahardjo, *op.cit*, h. 55

⁵³ *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, tetapi dalam metafisisnya berwujud kongkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁵⁴ Pengaturan hukum mengenai Indikasi Geografis diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, didalam 4 bab yaitu pada bab VIII-XI dan 16 pasal. Pada Undang-Undang tersebut, diatur mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis.

Didalam Pasal 1 angka 6 Indikasi Geografis adalah *suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan*. Dari pengertian

⁵⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut Indikasi Geografis memiliki dua fungsi utama. Disuatu sisi memberikan perlindungan kepada konsumen untuk secara langsung melawan tindakan pengguna Indikasi Geografis yang salah atau menyesatkan dan sisi lain memberikan perlindungan kepada yang berhak atas pemegang Indikasi Geografis.

Produk Indikasi Geografis yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Jadi Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki definisi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal
2. Suatu barang/dan atau produk
3. Karena faktor lingkungan geografis
4. Termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari faktor kedua tersebut Memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain:

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis.
2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli.
5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.
7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah.
8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk.
9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Adanya produk-produk unggulan daerah mempunyai arti penting bagi kemajuan perekonomian daerah tersebut, khususnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya. Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki keunikan cita rasa, keunikan bentuk khas tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya.⁵⁵

Disinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan daerah, yang menurut Undang-undang dapat dilindungi dengan cara mendaftarkannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa “Indikasi Geografis akan dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri”. Yang dimaksud didaftar oleh Menteri adalah pemohon dari masyarakat sekitar yang berbentuk lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan Indikasi Geografis tertentu yang antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pendaftaran tersebut dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis yang melekat pada suatu Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan penggunaan label atau tanda Indikasi Geografis menggambarkan adanya kualitas terhadap produk atau barang yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomis pada produk atau barang yang dihasilkan oleh daerah atau wilayah tersebut. Terlebih lagi Indonesia sebagai

⁵⁵ Al Hakim, (Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti) Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi, dan budaya serta iklim tropis telah menghasilkan berbagai macam produk Indikasi Geografis yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil. Oleh karena itu Indikasi Geografis sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sudah semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal.

Perlindungan terhadap indikasi geografis mendapat perhatian dunia internasional, sehingga berbagai macam perjanjian internasional mengatur hal tersebut. perlindungan hukum internasional indikasi geografis dapat kita temukan pada Paris Convention *for the protection of Industrial Property* tahun 1983, Madrid Agreement tahun 1891, perjanjian Lisabon 1958, Perundang-undangan Eropa dan Perjanjian TRIPs 1994.⁵⁶

Kopi Liberika Meranti merupakan satu-satunya Indikasi Geografis terdaftar dari provinsi Riau. Hal ini telah terbukti dengan telah terdaftarnya kopi yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Berita resmi Indikasi Geografis Seri – A No. 01/IG/I/A/2016, diumumkan tanggal 29 Januari 2016 – 29 April 2016, dengan No. Agenda IG.00.2014.00014 dengan nama Kopi Liberika Meranti yang didaftarkan oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM).⁵⁷

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 166.

⁵⁷ <https://dgip.go.id/berita-resmi-indikasi-geografis> Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2019 Pukul 09.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan telah terdaftarnya Kopi Liberika Rangsang Meranti ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, hal ini menunjukkan bahwa Kopi Liberika Rangsang Meranti harus mendapatkan perlindungan nasional maupun internasional. Kopi Liberika Meranti telah memiliki reputasi yang baik, karakteristik dan kualitas yang berbeda dengan daerah lainnya menyebabkan kopi ini cocok untuk dijadikan sebagai Indikasi Geografis terdaftar dan memiliki perlindungan hukum.

Sebagai Negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi Geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi Geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan dapat terjaga pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih maksimal. Disamping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah dengan terbukanya lapangan kerja dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.

Intervensi dari pemerintah diberlakukan dalam perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis yang terdiri atas perlindungan keluar dan perlindungan kedalam. Perlindungan dalam arti keluar, dalam artian bahwa peran serta dan kepedulian negara untuk berupaya memperjuangkan perlindungan yang memadai dalam kancah internasional, terhadap potensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produk yang berbasis indikasi geografis yang ada di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada kopi liberika meranti yang minim dilindungi sehingga tidak mudah digunakan oleh negara lain.

Hal ini tentunya berguna bagi kopi Liberika Meranti yang sudah memiliki tujuan ekspor yang merupakan bentuk aktivitas perdagangan internasional seperti di Malaysia dan Singapura. Sehingga dengan terdaftarnya sebagai Indikasi Geografis dengan pengawasan dari pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Meranti dan pemerintah pusat dapat membuat kopi liberika meranti terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala Bidang Pelayan Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau menyatakan bahwa: “Kopi Liberika Meranti didaftarkan sebagai Indikasi Geografis guna untuk menjaga orisinalitas khas kopi liberika serta menghindari dari kecurangan dalam aktivitas perdagangan internasional dan dipersalahgunakan oleh orang lain. Agar yang terjadi seperti di Gayo Mountain Coffee dan Torajja Coffe tidak terjadi lagi pada produk asli Indonesia”.⁵⁸

Sedangkan perlindungan kedalam harus lebih dipertegas didalam penegakan pengaturan perundang-undangan sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 66 “pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi

⁵⁸ Drs. Warudhju Gani Purwoko MH. Kepala Bidang Layanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Wawancara Pada Tanggal 19 Maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

indikasi geografis”. Oleh karena itu, bahwa pihak yang berhak atas pemakaian Indikasi Geografis adalah kelompok masyarakat setempat yang berada di daerah atau wilayah yang memiliki potensi perlindungan Indikasi Geografis, termasuk produsen, atau lembaga yang ditunjuk yang berada di daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis saja, seperti Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti. Pihak lain tidak berhak menggunakan label Indikasi Geografis kopi liberika. Sehingga nantinya dapat membantu dalam meningkatkan pendapat daerah ataupun kesejahteraan Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti.

Kabid Pelayanan Hukum Kemenkumham Riau menyatakan “atas pemakaian nama Indikasi Geografis kopi liberika oleh bukan masyarakat peduli kopi liberika rangsang meranti, hal tersebut baru dapat diproses bilamana dilaporkan terlebih dahulu kepada Kemenkumham Riau karena kami lebih kepada menunggu laporan masuk terlebih dahulu”. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Hukum Kopi Liberika Meranti sangat merugikan masyarakat tersebut, yang seharusnya Indikasi Geografis yang sudah didaftarkan mesti mendapat kepastian dan kemanfaatan hukum. padahal sudah jelas pemakaian nama Indikasi Geografis Kopi Liberika oleh bukan pendaftarnya dapat sangat mengganggu nama baik Kopi Liberika Meranti dengan ciri khas liberika merantinya.⁵⁹

⁵⁹ Drs. Warudhju Gani Purwoko MH. Kepala Bidang Layanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Wawancara Pada Tanggal 19 Maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas PPK & UKM Kab. Kepulauan Meranti “daerah rangsang pesisir terletak didaerah bagain terluar dan terdepan dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga sehingga lebih sulit melakukan pembinaan dan pengawasan secara lagsung terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti”.⁶⁰ Padahal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 70 bahwa seharusnya pemerintah pusat dan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kopi liberika meranti. Setelah penulis teliti kekurangannya peran pemerintah dalam hal perlindungan kedalam yaitu dalam memberikan perlindungan terhadap sebuah penekanan terhadap hasil Indikasi Geografis yang sudah terdaftar itu tidak hanya secara otomatis mendapatkan perlindungan tetapi juga setelahnya haruslah pemerintah memberikan perlindungan dalam konteks pembinaan, sosialisasi dan juga pengawasan kepada para petani tapi nyatanya tidak penulis temukan didaerah tersebut tepatnya di kecamatan Rangsang Pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, setelah melakukan penelitian kedaerah Kopi Liberika kecamatan Rangsang Pesisir kabupaten Kepulauan Meranti dan bertemu ketua Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti, Kepala Bidang Disperindag kabupaten Kepulauan Meranti dan Kemenkum HAM Riau maka penulis telah berhasil mengumpulkan beberapa

⁶⁰ Marwan SE, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas PPK& UKM Kab. Kepulauan Meranti wawancara pada tanggal 05 maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data mengenai bagaimana peran pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti maupun Pemerintah pusat. serta hambatan-hambatan yang terjadi terhadap Kopi Liberika Meranti yang merupakan salah satu produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar secara resmi oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti menyatakan “bahwa memang pemerintah sampai saat ini begitu kurang memperhatikan bagaimana Kopi Liberika Meranti ini untuk bisa mengembangkan produksinya, dari sejak dahulu mengajukan permohonan mesin sortir kopi dan gudang produksi yang lebih besar baru diawal tahun 2019 mendapatkan 1 unit mesin sortir kopi. Padahal kopi liberika meranti menjadikan icon Kabupaten Kepulauan Meranti”.⁶¹

Padahal Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sejak awal tahun 2018 menggerakkan tahun dimana perlindungan Indikasi Geografis dan sangat diharapkan untuk semua daerah yang punya potensi Indikasi Geografis untuk segera dilakukan pembinaan supaya nantinya dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis pada suatu daerah yang memang memiliki potensi Indikasi Geografis” tapi faktanya sampai pada akhir tahun 2020 program oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual hanyalah sampai pada tahap sosialisasi saja tanpa ada hasil yang memuaskan padahal nilai keistimewaan suatu daerah dan

⁶¹ Al Hakim, (Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti) Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu.

Kemudian yang paling mengecewakan bagi Masyarakat Peduli Kopi Liberika Meranti dikarenakan pemerintah tidak begitu ikut campur tangan untuk melindungi dan melestarikan Kopi Liberika Meranti, banyak menimbulkan permasalahan semacam transaksi jual beli biji kopi Liberika Meranti yang dijual belikan oleh bukan pemilik nama kopi liberika meranti ke negara Malaysia melalui pasar gelap. Sehingga biji yang dijual kenegara Malaysia melalui pasar gelap yang tanpa ada pengawasan dari pemerintah maka akan mudah menimbulkan klaim bahwa kopi liberika tersebut adalah kopi milik Negara Malaysia.

Tidak adanya tindakan tegas pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Meranti dan pemerintah pusat kepada penjual Kopi Liberika Meranti melalui pasar gelap yang diekspor ke Negara Malaysia sehingga secara tidak langsung akan mengurangi atau merugikan pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Meranti dan pemerintah pusat dalam hal pajak, tetapi sama sekali tetap tidak ada sanksi hukum yang diberikan kepada para penjual kopi liberika meranti yang secara illegal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan bahwa adapun yang menjadi Faktor-Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Instrument Hukum Tidak Lengkap

Secara umum, pengaturan mengenai Indikasi Geografis sudah diatur dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi sayangnya, telah terjadi konsep yang keliru mengenai konsep dasar dari apa yang dimaksud dengan Indikasi Geografis. Karena indikasi Geografis diatur dibawah Undang-undang Merek maka sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Indikasi Geografis adalah bagian dari merek yang memiliki sifat perlindungan dan karekteristik yang sama dengan perlindungan diberikan atas suatu merek.

Merek hanyalah merupakan suatu tanda yang diletakkan pada suatu barang yang berfungsi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda ini tidak berkaitan dengan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu, dimana karekteristik dari daerah tersebut yaitu faktor alam maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusianya mempengaruhi kualitas dan reputasi barang yang dihasilkan dari daerah tersebut.⁶²

Selain itu merek dapat dimiliki secara perseorangan atau perusahaan. Adapun indikasi geografis dapat dimiliki secara terbuka oleh suatu lembaga mewakili masyarakat atau kelompok konsumen tertentu. Dan dari jangka waktu perlindungan merek 10 tahun dengan masa perpanjangan 10 tahun. Sedangkan Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan, karena teragantung pada faktor alam dan manusianya penghasil barang yang bersangkutan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa Indikasi Geografis kurang tepat dimasukkan dalam Undang-undang Merek. Guna menghindari pemahaman-pemahaman yang keliru mengenai Indikasi Geografis maka diperlukan Undang-undang khusus Indikasi Geografis dan peraturan pelaksana yang mendampingi peraturan pokok Indikasi Geografis tersebut. Dengan tidak terperinci hukum yang mengatur Indikasi Geografis di Indonesia, hal ini tentunya akan berdampak pada penerapan dari sistem hukum itu sendiri. Sehingga penerapan hukum dari sektor Indikasi Geografis tidak dapat berjalan dengan baik.

Tidak hanya itu, konsekuensi dari penerapan sistem hukum yang tidak lengkap adalah bahwa hanya indikasi geografis yang terdaftar yang dilindungi pemerintah. Adanya kelemahan tersebut dapat mengakibatkan munculnya

⁶² Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak-pihak yang mengambil manfaat nama dan produk indikasi geografis yang belum didaftarkan menjadi produk yang didaftarkan sebagai merek dagang oleh pihak asing, mengingat potensi Indikasi Geografis Indonesia yang cukup besar.

2. Rumitnya Syarat Pendaftaran Indikasi Geografis

Pendaftaran Indikasi Geografis bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap hak atas Indikasin Geografis. Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meanti menyatakan “butuh waktu dan proses yang panjang untuk memperjuangkan Indikasi Geografis di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual”. Senada dengan hal tersebut, Kabid Pelayanan Hukum Kemenkumham Riau “bahwa untuk mendaftarkan Indikasi Geografis persyaratanya yang diajukan begitu banyak yang mesti dipenuhi”⁶³

Rumitnya syarat pendafataran Indikasi Geografis dapat dilihat dari instrument hukum Indikasi Gografis itu sendiri, ditandai dengan dimulainya pemersiksaan substantif oleh tim ahli yang bersal dari perwakilan kementerian yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan atau kementerian terkait lainnya. Tidak hanya itu, logo, uraian lingkungan geografis, uraian tentang karekteristik dan kualitas barang, uraian tentang sejarah, uraian tentang proses produksi dan pengelolaan, dan uraian tentang metode pengujian kualitas

⁶³ Drs. Warudhju Gani Purwoko MH.Kepala Bidang Layanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Wawancara Pada Tanggal 19 Maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang. Syarat tersebut diatas, merupakan syarat yang mesti diajukan terhadap Dirjen Hak kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan Indikasi Geografis.

Berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, syarat permohonan yang tergolong tidak rumit dan biaya pengeluaran tidaklah besar. Syarat Pendaftaran Indikasi Geografis yang banyak dan wajib melengkapi kesemua item diatas, biaya untuk tim ahli yang besar dan biaya pendaftaran permohonan lebih besar dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Yang semuanya ditanggung oleh Pendaftar Indikasi Geografis yang notabene dimiliki oleh kelompok Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti.

Rumitnya pendaftaran Indikasi Geografis tersebut, tentunya akan lebih sangat terbantu bila didorong oleh pemerintah daerah maupun pusat dan dinas terkait. Baik dengan cara melalui seminar, penyuluhan, workshop mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dan keuangan. untuk mengatasi problem yang dihadapi oleh masyarakat Indikasi Geografis agar produk potensial dan unggulan geografis Indonesia tidak dimiliki oleh pihak asing.

Seharusnya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemohon Indikasi Geografis, perlu dengan bentuk penyerderhanaan proses dengan cara adanya persyaratan minimum pada permohonan pendaftar. Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Indikasi Geografis yang lebih cepat sehingga mampu memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Indikasi Geografis dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kesadaran Hukum Masyarakat Rendah Terhadap Indikasi Geografis

Saat ini, kesadaran hukum perlindungan Indikasi Geografis belum terfokus, kurang serius dan belum disinergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun pusat. Hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi Indikasi Geografis. Kesadaran yang penulis maksud mengarah pada kurangnya perhatian dan kepedulian dari pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk melakukan sosialisasi terlebih lagi dalam rangka pembinaan kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat mengerti dan paham mengenai manfaat dari Indikasi Geografis tersebut.⁶⁴

Secara normatif aturan Indikasi Geografis sudah tertuang dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak Indikasi Geografis yang terdaftar di Indonesia, apalagi di luar negeri. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan arti penting dari perlindungan Indikasi Geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik Indikasi Geografis. Selama ini kesadaran tersebut muncul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi negara berkembang karena Indikasi Geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh

⁶⁴ Al Hakim, (Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti) Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak asing (negara maju) tanpa adanya *benefit sharing*. Di sisi lain masyarakat lokal Indonesia belum memahami perlindungan melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual. Orintasi anggota masyarakat lokal yang tidak sepenuhnya pada kebahagiaan material atau komersial, tetapi pada kebahagiaan spiritual.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika menyebabkan kerugian yang sangat besar. Asset Hak Kekayaan Intelektual dari provinsi Riau yang pernah diklaim oleh Malaysia sebagai miliknya yaitu lagu Soleram. Agar hal tersebut tidak terulang lagi, maka pemerintah yang berwenang harus dapat bekerja lebih keras lagi dengan turun kedaerah-daerah guna mencari potensi apa yang terjadi didaerah tersebut dan membantu masyarakat untuk mendaftarkan potensi Indikasi Geografis yang besar dari daerah tersebut.⁶⁵

Bahwa setiap instansi masih berdiri sendiri dan berjalan di jalurnya masing-masing tanpa ada yang mengkoordinir untuk kebaikan bersama. Sebagai salah satu contoh, yaitu bahwa kopi Liberika Meranti yang sudah didaftarkan di Dirjen Kekayaan intelektual, namun belum maksimal dalam pengolahan dan juga pemasaran secara nasional, kopi liberika lebih banyak diketahui oleh Negara Malaysia dan Singapura dari pada masyarakat lokal. Seandainya pemerintah daerah dan pusat mengendalikan beberapa instansi

⁶⁵ Al Hakim, (Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti) Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terkait dalam melakukan tugasnya masing-masing demi memaksimalnya produk kopi liberika meranti”

4. Pemerintah Belum Menjadi Koordinator Terhadap Instansi-Instansi Yang Berkaitan Terhadap Kemanjuan Indikasi Geografis

Pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara informal kepada para tetanga maupun keluarga walupun ia tidak diwajibkan oleh negara unuk melakukan itu, sementara di kantor, program tahunan dan bulanan dapat direncanakan dan dimaksimalkan untuk melakukan hal baik dalam meningkatkan kualitas produk Indikasi Geografis yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Misalnya : mengkoordinasikan dengan ahli desain grafis untuk membuat kemasan atau bungkus dari kopi Liberika Meranti menjadi lebih indah, dan mempromosikan pada saat dilakukan pameran oleh instansi lain di luar daerah atau luar negeri.

Sebagai sarana *sosial engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditunjuk untuk mengubah perilaku masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah, dimana hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah ataupun dinas terkait menuju lahan perkebunan dan tempat produksi kopi liberika masih sangat memperhatikan mulai dari sejak pelabuhan penyebrangan yang tidak layak, jalan utama yang hanya bisa dilalui oleh 1 kendaraan bermotor ditambah lagi jalan berlumpur bila musim penghujan. Seharusnya agar memudahkan dalam memberikan perlindungan hukum sarana dan prasarana juga harus mendukung yang dilakukan oleh setiap sektor yang terkait.

5. **Belum Cukupnya Tenaga Ahli Dalam Mengontrol Produk Indikasi Geografis Yang Berkualitas**

Sigernitas antara Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional hendaknya diikuti oleh instrument-instrumen pelaksana peraturan Perundang-undangan yang berhubungan didalamnya. Misalnya: evaluasi dari suatu produk Indikasi Geografis dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yaitu melalui perbandingan suatu produk dengan produk yang lainnya. Apabila produk tersebut tidak dapat menguasai pasar, maka Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dapat memberi masukan kepada masyarakat pemilik Indikasi Geografis tersebut dapat melakukan beberapa perbaikan. Tenaga ahli dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual masih dianggap kurang memadai untuk lingkup seluruh Indonesia.

Kekurangan tenaga ahli harus dapat menjadi perhatian Utama dari Pemerintah Pusat agar Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan baik. Perlindungan indikasi geografis sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat sudah saatnya direalisasikan. Potensi daerah harus digali seiring mewujudkan perekonomian berbasis kerakyatan, hasil ekonomi dari perlindungan indikasi geografis akan digunakan dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Agar Indikasi Geografis menjadi asset daerah yang potensial untuk dikomersilkan adalah :

1. Dilakukan inventarisasi produk daerah yang mempunyai reputasi/ dikenal luas dan berpotensi ekonomi.
2. Dilakukan penelitian tentang apa saja ciri atau kekhasan yang bisa diangkat pada produk tertentu agar mendapat perlindungan dari segi Indikasi Geografis;
3. Mencari dan menetapkan batas-batas geografis berdasarkan pengaruh terbesar yang menyebabkan adanya ciri dan kualitas tersebut. Cara agar suatu indikasi dapat ditemukan dari keadaan geografis tersebut.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis pada prakteknya tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perlindungan dan kepedulian negara dalam memperjuangkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti baik dalam segi pembinaan, sosialisasi dan juga pengawasan terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah instrumen yang hukum tidak lengkap, rumitnya syarat pendaftaran Indikasi Geografis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pemerintah belum menjadi koordinator terhadap instansi-instansi yang berkaitan terhadap kemanjuan Indikasi Geografis dan belum cukupnya tenaga ahli dalam mengontrol produk Indikasi Geografis yang berkualitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Adapun saran yang penulis dapat sampaikan atas kesimpulan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat maupun daerah harus mengupayakan perlindungan hukum secara maksimal, memperkuat peranannya dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan sehingga tidak terjadi sengketa yang dapat merugikan pemegang Indikasi Geografis terdaftar dan berdampak kepada persoalan pelaksanaan perdagangan internasional, pemasaram dalam negeri, persaingan usaha, dan juga politik.
2. Intrumen hukum harus dibenahi agar terdapat kepastian hukum sehingga tidak menjadi kemelut bagi masyarakat dalam mendaftarkan produk Indikasi Geografis. Selain itu diperlukan sinergitas antara instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti juga harus lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan Indikasi Geografis Kopi Liberika, tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pusat terhadap proses awal hingga akhir hasil Indikasi Geografis Kopi Liberika, sehingga diharapkan nantinya pemerintah dengan mudah memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhdap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Thalib Muchlsin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Achmad Zen Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2011).
- Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Rema Cipta, 2009).
- H.S Karatdjoemena, *Subtansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sistem Kelembagaan, prosedur implementasi dan kepentingan Negara Berkembang*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000).
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Yogyakarta: Yustisia, 2010).
- Jurnal Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2003).
- Mochtar Kasumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Moh. Nazir, *Metode penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).
- Rahmi Jened Prindari Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan hukum persaingan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: 1993).
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Statistik Daerah Kepulauan Meranti 2019*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, Katalog: 1101002.1410 Tahun 2019)
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, (Universitas Lampung: 2012).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Palu : Sinar Grafika, 2009)
- Rose Diana Daniswara, Hak Kekayaan Intelektual, http://abcdanis.id/2013/05/hakkekayaan-intelektual_15.html diakses pada 16 November 2018. Pukul 17:40 WIB.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2020 Jam 13:00 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol/20727/perlindungan-produk-indikasi-geografis-indonesia-masih-tertinggal/> Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2019 Pukul 10.00 WIB.
- <https://dgip.go.id/berita-resmi-indikasi-geografis> Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2019 Pukul 09.00 WIB.